

LIMITS TO GROWTH: MEMPERSOALKAN KEMBALI KAPITALISME

M. Taufiq Rahman

Dosen Filsafat Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN SGD Bandung

e-mail: fkrakoe@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengungkap tentang kegagalan kapitalisme pada saat-saat belakangan ini dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan lebih adil. Ini karena ada batas pertumbuhan secara sosial. Artikel ini juga mengungkap kembali degradasi kemanusiaan dari ide kapitalisme yang digaungkan sejak tiga abad yang lalu oleh Adam Smith. Sebagai refleksi dari dua tesis di atas, artikel ini membawa kita mengevaluasi keberadaan kapitalisme di Indonesia yang lebih membawa pada kerugian daripada keuntungan. Terakhir, tulisan ini menyarankan kepada bangsa Indonesia untuk kembali kepada falsafah bangsa, yaitu Pancasila di mana terdapat panduan untuk hidup dalam keseimbangan, yaitu keadilan sosial dan keadaban.

Kata kunci:

Kapitalisme; Filsafat sosial; Keadilan sosial; Pancasila; Falsafah Indonesia

Abstract

This article reveals the failure of capitalism in recent times in developing the better and more just society. It is because of the existence of limit to growth socially. This article also reveals the reality of human degradation in the idea of capitalism brought by Adam Smith since three centuries ago. Reflected to the two theses being discussed, this article leads us to evaluate the existence of capitalism in Indonesia which brings about the loss more than the fortune. At last, this writing suggests Indonesians as a nation to return to the nation's philosophy, i.e. Pancasila (Five Pillars), in which there is a guidance for balance in live: social justice and civility.

Keywords:

Capitalism, Social Philosophy, Social justice, Pancasila, Indonesia falsafah

A. PENDAHULUAN

Pada millenium yang lalu, tepatnya tahun 1972, Club of Rome mempublikasikan Laporan berjudul *The Limits to Growth*. Buku itu segera saja menjadi *best-seller* secara global. Walaupun mendapatkan banyak kritikan, ia telah menarik perhatian para ekonom, sehingga kemudian, konon, menjadi buku ekonomi yang paling berpengaruh di abad ke-20.

Pesan sentralnya adalah: pertumbuhan yang cepat—baik dalam bidang kependudukan maupun industrialisasi—telah melahirkan peningkatan dramatis dalam produksi dan konsumsi dunia, yang pada gilirannya membawakan masalah-masalah kekurangan sumber-daya dan polusi lingkungan yang tidak dapat terorganisir dengan baik. Dikatakan bahwa teknologi dapat menjawab masalah-masalah teknis, tetapi teknologi tidak dapat menyelamatkan kita. Pesan antaranya adalah: kita sudah terlalu banyak, kita memproduksi terlalu banyak, kita juga mengkonsumsi terlalu banyak. Ujung-ujungnya, karena keterbatasan planet kita ini, maka prospek pertumbuhan ekonomi yang tidak terbatas merupakan sebuah khayalan. Laporan itu menyimpulkan bahwa jika kita terus-menerus mengejar pertumbuhan yang tak terbatas di dunia yang terbatas ini—termasuk di dalamnya keterbatasan memikul beban limbahnya—maka kita akan menghadapi kehancuran lingkungan,

dan kehancuran itu nampaknya lebih cepat daripada yang dapat diduga.

Kemudian, hanya beberapa tahun setelah Laporan Club of Rome pada tahun 1970-an itu, Fred Hirsch menerbitkan buku *Social Limits to Growth*.¹ Dampaknya bagi iklim intelektual saat itu kurang begitu *sounding*, tetapi sebetulnya tidak kurang penting. Hirsch tidak sedikitpun menolak klaim sentral Club of Rome yang menyatakan bahwa terdapat keterbatasan fisik untuk pertumbuhan ekonomi. Suatu batasan yang menuntut orang yang berperasaan untuk memperhatikan masa depan manusia agar mengerem mimpi pertumbuhan ekonomi yang tiada akhir. Di sini Hirsch berargumen bahwa sebelum sampai pada batas fisik, kita juga dihadapkan pada tantangan sosialnya.

Pada tahun 1993, muncul buku lanjutan, yaitu *Beyond the Limits*² dan pada tahun 2004 para pengarang buku kedua itu menerbitkan buku ketiga: *Limits to Growth: The 30-Year Update*,³ melanjutkan argumen bahwa tanpa perubahan sistemik yang dalam, dunia industrialisasi akan mengarah pada kehancuran ekonomi dan lingkungan. Tidak mengherankan, Laporan itu, beserta dengan versi-versi

¹Fred Hirsch, *The Social Limits to Growth* (London: Routledge & Kegan Paul, 1977).

²William W. Behrens III Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jorgen Randers, *Beyond the Limits*, 1993.

³William W. Behrens III Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jorgen Randers, *Limits to Growth: The 30-Year Update*, 2004.

update nya, terus-menerus mendorong kontroversi di antara kaum ekonom, aktivis lingkungan, politisi, dan orang-orang yang tertarik terhadap tema tersebut. Sebagian menganggapnya serius dan sebagian lagi tidak.

Karena sering bermain di Partai Hijau Belanda (*Groen-Links*: Kiri Hijau) pada tahun 1990an akhir, saya tertarik terhadap wacana ini. Sebab, wacana inilah yang melahirkan ideologi “Eko-Sosialisme.” Sesuatu yang cukup menarik dan *trendy* di kalangan anak muda Barat pada waktu itu. Melalui wacana ini, tidak hanya Kapitalisme yang “dibantai”, tetapi juga Sosialisme: selama keduanya membangun dengan industrialisasi, selama itu pula akan merusak lingkungan. Bisa dibayangkan bahwa dengan wacana ini masyarakat industri dari berbagai aliran ideologis akan berhadapan dengan pengadilan lingkungan, dengan tuduhan kejahatan serius terhadap masa depan kemanusiaan.

Terkait dengan persoalan ancaman kehancuran lingkungan dan sosial akibat keterbatasan planet bumi untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan (ekonomi) tak-terbatas, tulisan ini akan lebih menyoroti Kapitalisme yang dipandang sebagai salah satu penyebab lahirnya tuntutan tersebut. Bagaimana watak dan paradoks-paradoks Kapitalisme, lalu pengalaman Indonesia dengan Kapitalisme dan tuntutan-tuntutannya itu, serta kemungkinan langkah apa yang perlu diambilnya dalam menghalau pengaruh

Kapitalisme yang tak terhindarkan itu?.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kapitalisme dan Kekacauan Sosial

Sebagaimana diakui oleh Adam Smith dalam bukunya, *The Wealth of Nations* (1776),⁴ ekonomi pertumbuhan adalah karakteristik utama masyarakat pasar kapitalis. Smith melihat ini sebagai hal yang sangat bagus karena akumulasi kekayaan Kapitalismelah yang mendorong kemajuan materi, bahkan untuk “barisan bawah” masyarakat. Di sini Kapitalisme mendorong orang untuk maju, siapapun orang itu. Demokrasi ekonomi pun nampak juga di sini. Namun keyakinan itu hanya benar untuk orang yang hidup di tanah air imperialis. Bagi yang hidup di dunia kolonial, tidak begitu keadaannya. Seabad kemudian, di tengah kritik tajamnya untuk kapitalisme, Karl Marx menuduh Smith sebagai pembawa jalan kepada ‘Kapitalisme pendegradasi manusia’ (*human degrading Capitalism*).

Dalam penjelasannya, Marx mengungkapkan bahwa kapitalisme adalah:

1. Individualistik. Kapitalisme memberlakukan konsep keadilan yang individualis posesif yang digunakan oleh kaum borjuis untuk

⁴Buku yang dirujuk adalah Adam Smith, *The Wealth of Nations*, Introduction by Professor Edwin R. A. Seligman, vol. 2 (London: J. M. Dent & Sons Ltd., 1910).

menjustifikasi hak-hak mereka akan kepemilikan pribadi dan kebebasan pasar. Dengan individualisme inilah kaum borjuis memeras tenaga buruh dengan alasan gaji yang ‘fair’, sedangkan pada saat yang sama buruh telah menyerahkan nasibnya pada kaum kapitalis yang pemikirannya hanyalah harta-milik pribadi.⁵

2. Pertukaran yang tidak sepadan (*unequal exchange*). Prinsip borjuis bahwa hal yang sama harus ditukar dengan harga yang sama dalam realitasnya tidak diamalkan. Menurut Marx, sistem gaji pada Kapitalisme ‘hanya pura-pura’, ‘semata-mata kemiripan’ atau asal ‘berbentuk’.⁶ Ketika mengatakan bahwa Kapitalis melakukan taktik licik dalam mencari keuntungan

⁵ “Harta-milik pribadi hasil sendiri, yang didasarkan, katakanlah, pada gabungan individu yang bekerja sendiri secara independen dengan kondisi-kondisi kerja-fisiknya, digantikan oleh harta-milik pribadi kapitalistik, yang bergantung pada eksploitasi kerja orang lain yang *nominally free* [hampir gratis –*peny.*], yakni pada kerja upahan.” (*Self-earned private property, that is based, so to say, on the fusing together of the isolated, independent labouring-individual with the conditions of his labour, is supplanted by capitalistic private property, which rests on exploitation of the nominally free labour of others, i.e., on wage-labour.*) Karl Marx, *Capital*, 3 vol., vol. I (Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1887), 762.

⁶ ‘Hanya ilusi’ (*only illusory*), ‘semata-mata kemiripan’ (*mere semblance*), atau asal ‘berbentuk’ (*form*) saja. Karl Marx, *Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy* (Rough Draft), terj. Martin Nicolaus (Harmondsworth: Penguin Books, 1973), 458, 509,551,674.

dengan cara tidak memberikan gaji yang sesuai dengan kerja buruh⁷ Marx menggunakan kata-kata ‘kelebihan kerja yang tidak dibayar’ (*unpaid surplus labour*),⁸ pencurian (*theft*),⁹ dsb.

3. Pemerasan (*exploitation*). Mode produksi kapitalis bukan contoh klaim kaum liberal atas ‘kebebasan, dengan kebebasan yang sama untuk yang lain’, atau atas ‘kebebasan, tetapi tidak mengganggu orang lain’, karena kapitalis itu betul-betul bebas

⁷“Karenanya, dengan mendapatkan kemampuan kerja yang ditukar sebagai padanannya, maka modal telah mendapatkan waktu kerja—dalam arti bahwa ia melampaui waktu kerja yang termuat dalam kemampuan kerja—yang ditukarnya secara tidak sepadan; ia (modal) telah menggunakan waktu kerja orang dengan tanpa pertukaran [tetapi] melalui bentuk pertukaran.” *Hence, by virtue of having acquired labour capacity in exchange as an equivalent, capital has acquired labour time –to the extent that it exceeds the labour time contained in labour capacity—in exchange without equivalent; it has appropriated alien labour time without exchange by means of the form of exchange.* Marx, *Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy* (Rough Draft), 674.

⁸ “Dengan demikian surplus kerja itu berarti kerja tanpa imbalan.” ([*H*]ence surplus labour, labour without equivalent.) *Grundrisse*, 457.

⁹ “Pencurian atas waktu kerja orang, yang kekayaan sekarang ini didasarkan padanya, tampak sebagai landasan yang menyedihkan **dihadapkan pada** landasan baru ini, yang diciptakan oleh industri berskala-besar itu sendiri” (*The theft of alien labour time, on which the present wealth is based, appears a miserable foundation in face of this new one, created by large-scale industry itself.*) Marx, *Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy* (Rough Draft), 705..

- untuk mengeksploitasi.¹⁰
4. Distribusi yang tidak sepatutnya (*improper distribution*). Dalam distribusi, kapitalisme didasarkan pada pribahasa “setiap orang berdasarkan kontribusinya”. Bagi Marx, hal ini tidak adil karena dalam hal kontribusi setiap orang itu berbeda kemampuannya, fisiknya, dll. Sementara itu dalam hal keperluan, setiap orang itu berbeda karena kondisinya yang berlainan, ada yang sudah kawin ada yang belum; ada yang punya anak banyak, ada yang tidak.¹¹
 5. Pemfakiran (*pauperisation*). Adanya suatu kelompok penganggur yang kronis, yaitu ‘angkatan cadangan’ dalam industri, merupakan suatu keharusan bagi kapitalisme. Angkatan cadangan industri, yang barisan-barisannya terutama terdiri

dari buruh-buruh yang jumlahnya terus meningkat akibat mekanisasi, menyajikan suatu sumber potensial sebagai buruh murah, yang merintangti tiap usaha kelas buruh untuk memperbaiki nasibnya. Jadi, sementara kelas kapitalis menimbun terus jumlah kekayaan, upah kaum buruh tidak pernah dapat naik, jauh di atas tingkat kehidupan cukup.¹²

Sejak Kapitalisme diberi landasan filsafat sosialnya oleh Smith, prospek pertumbuhan ekonomi memang seperti tidak ada ujungnya. *Income* per kapita memang selalu naik di setiap generasi. Di Inggris, generasi sekarang, misalnya, naik dua kali lebih kaya daripada generasi bapak-bapak mereka, empat kali lebih kaya daripada

¹⁰ “Hukum harta-milik pribadi—kebebasan, kesetaraan, harta-milik, harta-milik berdasarkan usaha sendiri, dan bebas menggunakannya—berubah menjadi hilangnya-kelayakan pekerja (*worker’s properlessness*), dan pelucutan-kepemilikan [Entäusserung] atas usahanya, [yakni] fakta bahwa dia berhubungan dengan usahanya sebagai harta-milik orang dan sebaliknya. ([T]he laws of private property – liberty, equality, property—property in one’s own labour, and free disposition over it—turn into the worker’s properlessness, and the dispossession [Entäusserung] of his labour, [i.e.] the fact that he relates to it as alien property and vice versa.) Marx, *Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy (Rough Draft)*, 674.

¹¹ Karl Marx, “Critique of the Gotha Programme,” dalam *Selected Works*, II, 21-24. Diseleksi dalam *Essential Writings of Karl Marx*, selected by David Caute (London: Panther, 1967), 249.

¹² “Namun, jika kelebihan populasi pekerja merupakan produk niscaya dari akumulasi atau perkembangan kekayaan berdasarkan basis kapitalis, maka kelebihan populasi ini sebaliknya menjadi pengungkit akumulasi kapitalistik, bahkan kondisi eksistensi mode produksi kapitalis. Ia menciptakan suatu persediaan pasukan cadangan industri siap-pakai, yang dimiliki modal secara cukup mutlak seolah modal tersebut telah membiakkannya atas ongkosnya sendiri. Tanpa bergantung pada limit peningkatan aktual populasi tersebut, ia menciptakan, karena kebutuhan ekspansi diri modal yang berubah-ubah, suatu kumpulan bahan manusia (*human material*) yang selalu siap dieksploitasi.” “Kemelaratan (*pauperism*) merupakan rumah-sakit angkatan-kerja aktif dan bobot mati kelebihan-populasi relatif,” “Oleh karenanya, akumulasi kekayaan di satu sisi pada saat yang sama merupakan akumulasi kesengsaraan, penderitaan kerja keras, perbudakan, kebodohan, kebrutalan, degradasi mental, di sisi lain, ...”. Marx, *Capital*, 3 vol., vol. I, 632, 644, 645.

generasi kakek mereka.

Pertanyaannya kemudian adalah: apakah generasi sekarang ini dua kali lebih bahagia dari bapak-bapak mereka, empat kali lebih bahagia dari kakek-kakek mereka atau lebih bahagia dari pendahulu mereka pada saat permulaan Revolusi Industri?

Prof. Richard Layard, tokoh kontemporer dalam “Studi Kebahagiaan” melihat data dari ekonomi kapitalis paling kuat dan sejahtera, menyatakan bahwa:

for most types of people in the West, happiness has not increased since 1950. In the United States people are no happier, although living standards have more than doubled. There has been no increase in the number of “very happy” people, nor any substantial fall in those who are “not very happy.”¹³

Di Inggris, Jepang dan Eropa Daratan fenomena yang sama juga diteliti: “Walaupun terdapat kemajuan massif dalam pendapatan riil di setiap segi distribusi *income*” kebahagiaan itu tidak melonjak naik. Apalagi jika diperbandingkan antara negara-negara Barat, “yang lebih kaya tidak lebih bahagia daripada yang miskin.” Demikian Layard.¹⁴

Bahagia kita rasakan ketika kita mendapatkan gaji yang lebih besar,

¹³Richard Layard., *Happiness: Lessons From a New Science* (New York: Penguin Press, 2005).

¹⁴Layard., *Happiness: Lessons From a New Science*, 31.

ketika kita berjuang menghilangkan kemiskinan fisik. Jelasnya, ketika kita mendapatkannya pertama kali. Tetapi ketika gaji naik dan kita tidak lagi miskin, kebahagiaan itu nyaris tidak ada. Fakta inilah yang oleh ekonom abad ke-19-an disebut sebagai prinsip penurunan utilitas marjinal (*diminishing marginal utility*). Prinsip ini menyatakan bahwa semakin banyak dikonsumsi, pada akhirnya setiap konsumsi unit tambahan memberikan utilitas tambahan yang menurun (penurunan utilitas marjinal). Setiap unit berikutnya dari suatu barang memiliki nilai yang kurang daripada barang sebelumnya. Prinsip ini membantu menjelaskan kemiringan negatif dari kurva permintaan dan hukum permintaan. Dalam bahasa keseharian kita, ini dinamakan inflasi, atau penurunan harga barang.

Dengan demikian, ideologi Kapitalisme yang menyuarakan individualisme posesif (*possessive individualism*) sudah terbantahkan oleh ketiadaan kebahagiaan akhir di atas.

Diskusi tentang utilitas marjinal di atas membawa kita pada pembicaraan tentang barang-barang posisional (*positional goods*). Fred Hirsch banyak sekali bercerita tentang bagaimana mengecewakannya hasil dari pertumbuhan ekonomi, sekurang-kurangnya bagi masyarakat yang telah membuat lompatan dari kelaparan ke kemiskinan dan ke kemakmuran (*affluence*). Ia ingin menjelaskan “paradoks kemakmuran”: Kenapa kita

begitu fokus pada pertumbuhan ekonomi, padahal, ketika didapatkan, ia hanya memberikan sedikit kepuasan?.

2. Kondisi *Limits to Growth* di Indonesia: Keterbatasan SDM dan Tuntutan Kapitalisme

Terkait dengan persoalan *limits to growth*, apa yang dapat kita lihat dari kondisi Indonesia adalah bahwa kita berhenti untuk terus tumbuh, bukanlah karena kita sudah puas di level kemakmuran (*affluence*), tetapi justru karena kemakmuran itu sangat susah kita gapai. Mimpi bahwa kita bisa tinggal landas (*take off*) seperti dalam kerangka evolusi kemajuan ala W.W. Rostow¹⁵ yang disuarakan Rezim Orde Baru kandas di tengah jalan.

Dengan demikian, keterbatasan untuk tumbuh (*limits to growth*) di Indonesia adalah karena kita tidak mampu. Mungkin pihak pemerintah hendak terus mengejar agenda MDGs (*Millenium Development Goals*) dari PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), tetapi rakyat kita memang belum punya kapabilitas dan sumber daya untuk itu. Apa yang terjadi malahan adalah penguatan kembali tradisionalisme. Untuk tetap *survive*, masyarakat kita harus melakukan pertahanan diri dari serangan berbagai bentuk kapitalisme. Sebab kalau terus dituruti, kapitalisme

¹⁵W. W Rostow, *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto* (Cambridge: Cambridge University Press, 1960).

akan menjerat kita sampai kita tidak bisa bernafas untuk hidup.

Berbagai contoh dapat kita perlihatkan bahwa kita lebih baik hidup seadanya daripada mengejar terus ketertinggalan budaya. Runtuhnya bisnis MLM (*multi level marketing*) dengan berbagai produknya adalah bukti bahwa masyarakat kita masih rasional, sebab produk-produk yang dijual dengan cara MLM itu biasanya mahal-mahal, walaupun memang bagus-bagus. Begitu pula, kita lebih baik memakai produk-produk *economic version* daripada memaksakan diri mengambil jalan *trendy* yang biasanya juga mahal-mahal. Maraknya *hape-hape* buatan Tiongkok di pasaran membuktikan bahwa konsumennya memang banyak dari kalangan kita.

Demikianlah, kita seolah-olah kembali ke budaya kemiskinan (*culture of poverty*) yang disuarakan Oscar Lewis.¹⁶ Atau kita kembali lagi ke zaman pembangunan berparadigma ganda seperti yang disinyalir oleh Boeke¹⁷ bahwa tradisionalisme dan modernisme berjaln tanpa saling menyapa. Atau juga kembali ke masyarakat Prismatic yang disuarakan

¹⁶Oscar Lewis, "Culture of Poverty," dalam Daniel P. Moynihan, *On Understanding Poverty: Perspectives from the Social Sciences* (New York: Basic Books, 1969).

¹⁷Boeke J.H, *The Structure of Netherlands Indian Economy* (New York: Institute of Pacific Relations, 1942); J.H Boeke, *Economics and Economic Policy of Dual Societies: As Exemplified by Indonesia*. (Haarlem: H.D. Tjunk Willink & Zoon N.V., 1953).

Riggs,¹⁸ yaitu kita berada di masyarakat transisi antara tradisionalisme dan modernisme.

Tetapi kita juga memang melihat adanya perlombaan borjuistik di kota-kota, yang membuat teori Hirsch tadi relevan.

Oleh karena itu, dari berbagai segi, baik segi defensif tradisionalisme maupun kemacetan konsumerisme, kebaikan kapitalisme bagi manusia memang harus selalu kembali kita pertanyakan. Lagi pula, kapitalisme yang ajaran dan prakteknya kita peroleh memang tidak utuh. Kita mengetahui Kapitalisme dari Belanda, yang saat menjajah dulu, memang tidak melakukan industrialisasi. Saat itu, konon, Belanda hanya mengeruk hasil alam kita dan menjualnya di pasaran global secara mentah. Ini betul-betul tindakan “pencurian” dan tidak ada sama sekali sifat edukasinya. Maka, ketika kita rebut kemerdekaan, kita tidak dalam kondisi Kapitalis. Malahan, untuk menjual produk pun kita tidak dipercaya oleh dunia.

Tetapi, lagi-lagi, kapitalisme itu memang vampir. Bukan dari segi ia menyedot darah kaum buruh, misalnya. Tetapi karena ia tidak mati-mati. Demikian kata Zizek, yang dikutip Goenawan Mohamad.¹⁹ Misalnya,

¹⁸Fred W. Riggs, *Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic Society* (Boston: Houghton Mifflin Company, 1964).

¹⁹Goenawan Mohamad, “Demokrasi dan Disilusi.” Orasi Ilmiah dalam Acara *Nurcholis Madjid Memorial Lecture (NMML)*, Universitas

ketika Kapitalisme itu hampir *collapse*, muncul ide negara kesejahteraan (*welfare state*) yang mengoreksi Kapitalisme pasar bebas dengan adanya redistribusi melalui subsidi silang dan pajak negara. Pendapat Keynes itulah yang kemudian menyelamatkan kondisi pasca Perang. Konon, kemujarabannya itu bukan hanya untuk Amerika Serikat, tetapi untuk dunia, dengan suatu program rehabilitasi yang disebut dengan Marshall Plan.

Ide rehabilitasi ini pulalah yang memunculkan lembaga-lembaga keuangan dunia seperti IMF dan World Bank, yang pada saatnya, bukannya menolong, tetapi meruntuhkan, ekonomi negara-negara yang bergantung kepadanya. Kita masih mengalaminya sejak kita mengambil utang kepada IMF di akhir rezim Soeharto.

Lembaga-lembaga keuangan ini kemudian, bukan hanya memberikan pinjaman, tetapi juga mensyaratkan agenda-agenda liberalisasi. Salah satu diantaranya adalah liberalisme pendidikan tinggi. Lembaga-lembaga seperti WTO dan World Bank mengkampanyekan ‘globalisasi pendidikan tinggi’ dan ‘reformasi Pendidikan Tinggi’. Di UU Pendidikan Tinggi (yang disahkan tahun 2012), kooptasi wacana pembangunan dari dua lembaga ini terlihat dalam beberapa pasal: Pasal 48 (Kerjasama penelitian dengan industri dan dunia usaha), pasal

Paramadina23 Oktobert.t., 2008.

65 (wewenang PTN Badan Hukum untuk mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi), pasal 85 (pembiayaan pendidikan tinggi oleh mahasiswa), pasal 86 (insentif kepada dunia usaha untuk membiayai pendidikan tinggi), pasal 87 (hak mengelola kekayaan negara), pasal 88 (standar satuan biaya operasional pendidikan), pasal 89 (pendanaan PTN Badan Hukum), dan yang paling mencolok, pasal 90 (penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh PT negara lain).²⁰

Di masa kejayaan Soeharto, kapitalisme memang ikut berjaya di Indonesia. Saat itu, sambutan atas Penanaman modal asing (PMA) sangat meriah. Dipercayai bahwa kehadiran investasi asing pasti mendatangkan manfaat bagi pembangunan ekonomi nasional (peningkatan daya saing, alih teknologi, dst) dan turunannya adalah terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Padahal, studi jangka panjang yang dilakukan oleh Tanushree Mazumdar mengenai dampak investasi asing di India, menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara investasi asing dan pertumbuhan ekonomi. Terlebih, sebuah studi dari sosiolog dan pemerhati ekonomi politik Amerika Latin terkemuka James Petras, terhadap manfaat investasi asing di negara-negara Amerika Latin, menunjukkan bahwa justru PMA itulah yang merugikan, bukan menguntungkan.

²⁰UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Dalam studinya berjudul *Six Myths About the Benefits of Foreign Investment The Pretensions of Neoliberalism* (2006), Petras merangkum temuannya itu sebagai berikut:

- 1) Investasi asing lebih tertarik untuk membeli perusahaan-perusahaan BUMN kategori untung/sehat dan kemudian memprivatisasinya atau membeli perusahaan-perusahaan swasta dalam kategori yang sama, dan menguasai pasar perusahaan tersebut. Sementara dalam soal teknologi, mereka hanya menjual atau menyewakan desain teknologi yang telah dibuat di 'negara asal,' yang jumlahnya mencapai lebih dari 80 persen. Jadi, apa yang disebut alih teknologi itu adalah bagaimana cara-cara baru dalam menjual teknologi, bukan alih kemampuan riset dan desain teknologi.
- 2) Investor asing lebih tertarik membeli atau menginvestasikan uangnya ke sektor-sektor pertambangan yang sangat menguntungkan dan kemudian mengekspornya dengan sedikit atau tanpa nilai tambah sama sekali.
- 3) Investor asing terlibat dalam penipuan pajak, penipuan dalam pembelian perusahaan-perusahaan publik, dan praktek pencucian uang dalam skala besar.
- 4) Penambahan hutang baru di bawah kondisi ekonomi yang tidak sehat

dan pembayaran kembali secara ilegal utang-utang yang dibuat oleh pemerintahan diktator, hanya akan membahayakan keberadaan dan integritas sistem keuangan domestik yang kemudian memicu kebangkrutan keuangan, sebagaimana yang menjadi pengalaman Argentina antara periode 1976-2001.

- 5) Mayoritas investasi asing itu adalah investor asing yang meminjam tabungan nasional untuk membeli perusahaan-perusahaan lokal dan membiayai investasinya.
- 6) Investor asing, lebih dari investor lokal, sangat mudah merelokasikan investasinya ke tempat-tempat yang lebih menguntungkan dan menciptakan situasi ekonomi yang sangat fluktuatif (*boom and bust economy*).

Hari ini Kapitalisme masih berpengaruh besar, terutama dengan dimunculkannya kawasan-kawasan pasar bebas seperti AFTA, NAFTA, dsb. Secara ideologis, aliran ini disebut sebagai aliran neoliberal. Bagi negara-negara yang SDM-nya sudah kuat, hal ini tidak menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Tetapi bagi kita yang kualitas SDM nya masih rendah, tentu ini akan menjadi ancaman serius.

3. Menghalau Pengaruh Kapitalisme: Menegaskan Kembali Konsensus Kita

Indonesia adalah negara pluralis,

yang mengakui berbagai unsur baik itu agama, suku, golongan, dan budaya, termasuk ideologi. Ini merupakan suatu kekayaan yang sudah *given*. Untuk mengatasi mengguritanya Kapitalisme dalam kehidupan kita, kita mesti menjalin kembali persatuan di antara berbagai unsur tersebut untuk memikirkan dan merasakan kembali kohesi sosial kita sebagai sebuah bangsa yang mandiri, utuh, dan berdaulat. Inilah konsensus kita tentang “Persatuan Indonesia.” Di sini negara dan rakyat, negeri maupun swasta, dapat bahu-membahu membangun bangsa secara bersama-sama.

Kita bisa saja mengajukan kembali Negara Kesejahteraan ala Keynesian. Sedemikian rupa, sehingga alat-alat produksi harus diorganisasikan menurut kebutuhan masyarakat yang secara struktural akan mendorong upaya untuk peningkatan teknologi atas alat produksi itu sendiri. Yang pada saatnya, dapat memberikan kesejahteraan secara merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Inilah konsensus kita tentang “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Kekuatan negara dan rakyat tadi tidak bisa kita lakukan secara *ad hoc*. Harus ada usaha-usaha ‘persambungan lidah’ dari dua kekuatan tersebut, sehingga dapat diramu menjadi suatu keseimbangan sosial-politik-ekonomi nasional yang ajeg. Di sinilah diperlukannya institusi-institusi yang melaksanakan, mengawasi, dan mengawal pembangunan. Ini dapat

berupa kementerian-kementerian, DPR/DPRD, Komisi-komisi seperti KPK dan Komnas HAM, LSM-LSM, media, dll. Dalam teori politik ekonomi, konon ini disebut sebagai aliran institusionalisme. Namun ini dapat kita sandarkan pada konsensus kita yang berbunyi, “Kerakyataan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan/perwakilan.”

Semua ide, kegiatan, dan pengawasan pembangunan itu harus kita landasi dengan kemanusiaan sebagai pusat perhatian kita; bukan pada akumulasi modal, dan lain-lain. Sebab dengan manusialah kita saling membantu dan saling bergaul. Tentu hal itu harus kita lakukan dalam kerangka keadaban (*civility*). Di sini kita pun punya sandarannya, yaitu konsensus tentang “Kemanusiaan yang adil dan beradab.”

Dan akhirnya, kita semua dinaungi oleh kepercayaan kepada Yang Maha Luhur, yang adi-material, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Dia-lah tujuan kita hidup dan cara kita hidup. Karena Dia jualah asal kita hidup. Dengan demikian, segala hal yang bersifat material dan kapital bukanlah tujuan kita. Tujuan kita, sekali lagi, adalah seperti tersebut dalam konsensus pertama kita, “Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Demikianlah, Pancasila bisa kembali menjadi sakti apabila kita terjemahkan dalam kehidupan kita

secara murni dan konsekuen, termasuk dalam mengatasi Kapitalisme.

C. KESIMPULAN

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pemaparan di atas:

1. Secara ekologis, Kapitalisme mengancam kelestarian lingkungan oleh sifatnya yang bersifat mencari untung dengan berbagai cara.
2. Secara individual, Kapitalisme tidak membuat adanya kebahagiaan.
3. Secara sosial, Kapitalisme telah membuat adanya kekacauan sosial.
4. Secara ekonomis, Kapitalisme bukannya menguntungkan, tetapi justru merugikan rakyat.
5. Secara historis, di Indonesia Kapitalisme telah menyengsarakan rakyat, karena adanya imperialisme Belanda, utang luar negeri, dan modal asing.
6. Secara futurologis, Indonesia tengah diancam oleh pasar bebas kawasan dan global.
7. Secara proyektif, kita harus kembali menegaskan kedirian kita sebagai bangsa yang mandiri, yang kohesif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur seperti kebersamaan, senasib sepenanggungan, tepa selira, gotong royong, dll., jauh dari sikap-sikap Kapitalistik.
8. Pancasila tetap relevan untuk menanggulangi Kapitalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Boeke, J.H. *Economics and Economic Policy of Dual Societies: As Exemplified by Indonesia*. Haarlem: H.D. Tjunk Willink & Zoon N.V., 1953.
- Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jorgen Randers, and William W. Behrens III. *Beyond the Limits*, 1993.
- . *Limits to Growth: The 30-Year Update*, 2004.
- Hirsch, Fred. *The Social Limits to Growth*. London: Routledge & Kegan Paul, 1977.
- J.H, Boeke. *The Structure of Netherlands Indian Economy*. New York: Institute of Pacific Relations, 1942.
- Layard., Richard. *Happiness: Lessons From a New Science*. New York: Penguin Press, 2005.
- Lewis, Oscar. "Culture of Poverty." Dalam Daniel P. Moynihan, *On Understanding Poverty: Perspectives from the Social Sciences*. New York: Basic Books, 1969.
- Marx, Karl. *Capital, 3 vol., vol. I*. Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1887.
- . "Critique of the Gotha Programme." *Selected Works, II*,. Dalam *Essential Writings of Karl Marx*, diseleksi oleh David Caute. London: Panther, 1967
- . *Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy (Rough Draft)*. Diterjemahkan oleh Martin Nicolaus. Harmondsworth: Penguin Books, 1973.
- Mohamad, Goenawan. "Demokrasi dan Disilusi." Orasi Ilmiah dalam Acara *Nurcholis Madjid Memorial Lecture (NMML)*, Universitas Paramadina, 23 Oktober 2008.
- Riggs, Fred W. *Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic Society*. Boston: Houghton Mifflin Company, 1964.
- Rostow, W. W. *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*. Cambridge: Cambridge University Press, 1960.
- Smith, Adam. *The Wealth of Nations*. Diterjemahkan dan Introduction by Professor Edwin R. A. Seligman. London: J. M. Dent & Sons Ltd., 1910.
- UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.